

## Mendefinisikan ulang keterampilan dan kompetensi pustakawan untuk mendukung ekosistem investasi di Indonesia: studi kasus di perpustakaan BSN

Muhammad Bahrudin<sup>a,\*</sup> dan Nursidik Fadillah<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup>Badan Standardisasi Nasional, Perpustakaan

<sup>a</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

### Abstrak

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan investasi, terutama melalui deregulasi peraturan dan kebijakan. Salah satu implementasi dari upaya deregulasi tersebut adalah pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Kementerian Investasi/BKPM sebagai sentra layanan terintegrasi untuk kegiatan perizinan dan nonperizinan terkait investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam hal ini ikut andil sebagai lembaga yang menyediakan konter layanan di PTSP Pusat dalam rangka memberikan dukungan layanan di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). Implikasinya adalah BSN membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung layanan tersebut. Saat ini personel yang bertugas di PTSP Pusat tersebut adalah pustakawan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh pustakawan untuk mendukung ekosistem investasi di Indonesia melalui layanan PTSP Pusat. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Pada makalah ini penulis berfokus pada kasus pustakawan BSN selaku informan yang ditugaskan sebagai *liaison officer* di PTSP Pusat. Temuan dalam kajian ini diantaranya ialah pustakawan di perpustakaan khusus perlu untuk meningkatkan dan mengadopsi 11 (sebelas) keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan tugas dan fungsi lembaga, serta ekosistem investasi untuk menghasilkan kinerja pustakawan yang optimal bagi lembaga induk dan juga masyarakat secara umum. Simpulan kajian ini yaitu; *Pertama*, perpustakaan khusus memiliki kecenderungan sumber daya yang berbeda-beda antara satu lembaga dan lembaga lainnya yang berdampak pada kebutuhan keterampilan dan kompetensi yang berbeda-beda pula. *Kedua*, perpustakaan khusus dapat bersinergi dengan lembaga di luar lembaga induknya dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi pengguna yang tersegmentasi. *Ketiga*, pustakawan di perpustakaan khusus sangat penting untuk menguasai subjek di lingkungan kelebagaannya sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga induknya. *Keempat*, kesenjangan keterampilan dan kompetensi yang dialami oleh pustakawan di perpustakaan khusus dapat diatasi dengan berbagai langkah strategis.

**Kata kunci:** Perpustakaan khusus, Kompetensi pustakawan; Investasi; *Subject specialist*; Pustakawan khusus

**Korespondensi:** Muhammad Bahrudin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia

Email: m.ambar@live.com

<http://jurnal.unpad.ac.id/informatio>

DOI: <https://doi.org/10.24198/inf.v1i3.36001>

Received: Oktober 2021; Accepted: Desember 2021; Published: Desember 2021

© Informatio 2021. This is an open access article under the CC BY-SA license

***Redefining librarian skills and competencies to support investment ecosystem in  
Indonesia:  
case study in BSN library***

***Abstract***

*The Indonesian Government has made various efforts to increase investment, mainly through deregulation. One of the implementations of these deregulation efforts is the development of the One-Stop Service Center (PTSP) at the Ministry of Investment/BKPM as an integrated service center for licensing and non-licensing activities related to investment, Foreign Investment (PMA), and Domestic Investment (PMDN). Badan Standardisasi Nasional (BSN) took part in providing service counters at the Central PTSP to provide services in the field of Standardization and Conformity Assessment (SPK). The implication is that BSN requires competent human resources to support these services. Currently, the personnel assigned to the Central PTSP is a librarian. This study aims to identify the skills and competencies needed by librarians to support the investment ecosystem in Indonesia through Central PTSP services. This study was designed by qualitative research with a case study method. Data collection methods using literature study and in-depth interview. This paper focused on the case of a BSN librarian as an informant who was assigned as a liaison officer at the Central PTSP. Data analysis was carried out using a descriptive method. Findings in this study highlight that librarian in special libraries need to improve and adopt 11 (eleven) skills and competencies that are relevant to the duties and functions of the institution, as well as an investment ecosystem to produce optimal librarian performance for the parent institution and society in general. The conclusions of the study include; First, special libraries have different resource tendencies from one institution to another which have an impact on different needs for skills and competencies. Second, special libraries can synergize with institutions outside the parent institution to meet the information needs of segmented users. Third, librarians in special libraries are very important to be subject specialists in their institutional environment. Fourth, the skills and competencies experienced by librarians in special libraries can be overcome by various strategic steps.*

***Keywords:*** *Special library; Librarian competencies; Investment; Subject specialist; Special librarian*

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi suatu negara berkorelasi positif dengan ekosistem bisnis yang subur. Selain itu, hal ini juga tak lepas dari peran investasi. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, investasi menjadi salah satu faktor penentu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Kondisi terkini, harus diakui bahwa dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan dalam rangka membantu para investor maupun calon investor, muaranya adalah peningkatan investasi di Indonesia.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*omnibus law*) dan petunjuk operasionalnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan payung hukum yang salah satu intinya adalah memudahkan jalannya investasi di Indonesia. A'la dan Supriyadi (2020) menunjukkan bahwa dengan dibentuk dan diundangkannya *omnibus law* ini tentunya akan mempermudah investasi bagi pihak investor yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian sebagai kemakmuran rakyat. *Omnibus law* sebagai aturan hukum akan

mewujudkan aturan hukum dalam aspek ekonomi sebagai bentuk kepastian hukum, kebermanfaatan dan keadilan.

Pada 27 Juli 2021, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah memublikasikan data realisasi investasi periode April – Juni (Triwulan II) tahun 2021 yang mencapai Rp223 triliun. Sementara data realisasi investasi secara akumulatif sepanjang periode Januari – Juni tahun 2021 mencapai Rp442,8 triliun. Realisasi investasi selama Triwulan II 2021 mengalami peningkatan sebesar 16,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (Rp191,9 triliun). Capaian investasi periode Januari – Juni ini menyumbang 49,2% terhadap target investasi tahun 2021 sebesar Rp900 triliun.



**Gambar 1. Perkembangan Realisasi Investasi 2016 – Juni 2021: per Triwulan**

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 27 Juli 2021

Data pada Gambar 1 sesungguhnya menunjukkan bahwa peningkatan investasi berkorelasi dengan upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem investasi yang terintegrasi. Salah satu upaya menciptakan ekosistem investasi yang terintegrasi di Indonesia adalah penyediaan infrastruktur dan sistem yang memudahkan bagi investor dan calon investor melalui pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di kantor Kementerian Investasi/BKPM yang diresmikan pada 26 Januari 2015. Rachman (2015) menunjukkan bahwa PTSP ini merupakan sarana terintegrasi untuk kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Setidaknya 19 Kementerian/Lembaga (K/L) telah menempatkan *liaison officer/LO* (petugas penghubung) di PTSP Pusat, salah satunya adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN). Jika melihat tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU SPK), sebagai lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang SPK, peran BSN di PTSP Pusat tidak

memberikan perizinan kepada investor tetapi lebih berfungsi pada dukungan layanan. “BSN dapat menyediakan informasi bagi investor yang akan mendirikan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), maupun terkait pengurusan administrasi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI atau SPPT SNI” (BSN, 2015).

Kemudian, terkait *liaison officer* (petugas penghubung) yang ditugaskan oleh manajemen BSN sejak awal selalu mengalokasikan personel dari unit informasi. Sebelum tahun 2018 (pra-reorganisasi), unit informasi terkait adalah Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi (Pusido) dan setelah tahun 2018 (pasca-reorganisasi), unit informasi berada di Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi (HKLI). Saat ini, untuk pertama kalinya, personel yang ditugaskan sebagai *liaison officer* (petugas penghubung) adalah seorang pustakawan.

Berdasarkan kondisi tersebut, pustakawan dianggap memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan di PTSP Pusat. Pustakawan dalam hal ini dipercaya untuk mengkomodir layanan kelembagaan dan teknis di bidang SPK sebagai upaya mendukung ekosistem investasi di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pustakawan BSN ke depannya terkait upaya pemenuhan *gap* atau kesenjangan keterampilan dan kompetensi inti di bidang perpustakaan disandingkan dengan keterampilan kelembagaan dan teknis terkait SPK dan ekosistem investasi.

Beberapa penelitian terkait kompetensi pustakawan telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun demikian, sebagian besar masih berfokus di bidang perpustakaan, dokumentasi, informasi, kepustakawanan, dan ekosistem riset, yang kemudian dikorelasikan dengan fenomena disrupsi teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Namina Khot yang berjudul *Library Organization Skills and Competencies for Library Professionals in the ICT Environment*. Khot (2020) menunjukkan bahwa garis besar temuan dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa saat ini dunia kepustakawanan telah berubah dari aspek tradisional ke arah aspek teknologi yang kemudian berdampak pada perubahan kebutuhan keterampilan dan kompetensi yang relevan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wendy G. Pothier dan Patricia B. Condon yang berjudul *Towards Data Literacy Competencies: Business Students, Workforce Needs, and the Role of the Librarian* menyajikan temuan bahwa keterampilan *data literacy* (literasi data) sangat penting dimiliki oleh pustakawan karena hari ini dunia bisnis dan industri akan semakin mengarah pada *data centric ecosystem* (ekosistem berbasis data). Lebih lanjut, dapat disimpulkan berdasarkan Pothier dan Condon (2020) bahwasanya setiap orang saat ini perlu memiliki keterampilan literasi data dan pustakawan dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui berbagai aktivitas edukasi.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, kajian ini memiliki unsur kebaruan karena bertujuan untuk mengidentifikasi *skills and competencies* (set keterampilan dan kompetensi) yang dibutuhkan oleh pustakawan dalam kaitannya dengan tugas sebagai *liaison officer* (petugas penghubung) di PTSP Pusat, Kementerian Investasi/BKPM. Set keterampilan dan kompetensi tersebut terkait kelembagaan dan teknis di bidang SPK, ekosistem investasi, dan juga *skills* (Keterampilan) terkait lainnya yang relevan dalam rangka melaksanakan tugas tersebut. Rumusan set keterampilan dan kompetensi ini nantinya dapat pula relevan untuk diadopsi oleh kementerian, lembaga, dan/atau instansi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas investasi seperti.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berdasarkan tujuannya merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode studi kasus. “Kunci penelitian studi kasus memungkinkan untuk dapat menyelidiki suatu peristiwa, situasi, atau kondisi sosial tertentu dan untuk memberikan wawasan sosial dalam proses yang menjelaskan bagaimana peristiwa atau situasi tertentu terjadi” (Hodget & Stolte, 2012). Lebih lanjut, Hodget dan Stolte (2012) menjelaskan bahwa studi kasus individu, kelompok, dan komunitas dapat membantu untuk menunjukkan hal-hal penting yang akan menjadi perhatian, proses sosial masyarakat dalam peristiwa yang konkret, dan pengalaman pemangku kepentingan. Studi kasus dapat mengilustrasikan bagaimana suatu kondisi atau permasalahan dapat diatasi melalui kajian.

Menurut Prihatsanti, Suryanto dan Hendriani (2018), peneliti studi kasus berfokus pada kasus tertentu secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi hubungan sosial, proses, dan kategori yang secara bersamaan dapat dikenali, khas, dan unik. Pada makalah ini penulis berfokus pada kasus pustakawan BSN yang ditugaskan sebagai *liaison officer* (petugas penghubung) di PTSP Pusat Kementerian Investasi/BKPM. Penulis dalam hal ini ingin mengidentifikasi set keterampilan dan kompetensi apa saja yang dimiliki dan perlu dimiliki oleh pustakawan tersebut sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini tentu sejalan dengan pendapat Stake (1995) dalam Prihatsanti, Suryanto, & Hendriani (2018) yang menunjukkan bahwa sebagai bentuk penelitian, studi kasus ditentukan oleh minat pada kasus individual, apa yang dapat dipelajari dari sebuah kasus tunggal.

Kajian ini dilakukan mulai dari tanggal 30 Agustus 2021 – 9 September 2021 dengan informan 1 (satu) orang, yaitu seorang pustakawan yang saat ini ditugaskan sebagai *liaison officer* (petugas penghubung) BSN di PTSP Pusat Kementerian Investasi/BKPM. Penentuan informan ini dilakukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Alasan pemilihan dengan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu memiliki jabatan pustakawan, dan ditugaskan sebagai *liaison officer* (petugas penghubung) PTSP Pusat Kementerian Investasi/BKPM.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan *in-depth interview* (wawancara mendalam). Wawancara merupakan sumber penting dalam studi kasus ini. “Wawancara dilakukan secara terbuka yang memungkinkan informan berkomentar tentang peristiwa tertentu, mengusulkan solusi, atau memberikan wawasan atas suatu peristiwa, dan juga menguatkan bukti dari sumber lain” (Yin, 2002). Sementara untuk menjamin validitas data terutama hasil wawancara, penulis melakukan triangulasi dengan berbagai sumber bukti dan pengecekan data, seperti literatur, dokumen, artikel-artikel terkait, dan juga melakukan *review* (peninjauan ulang) kepada informan mengenai laporan studi kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

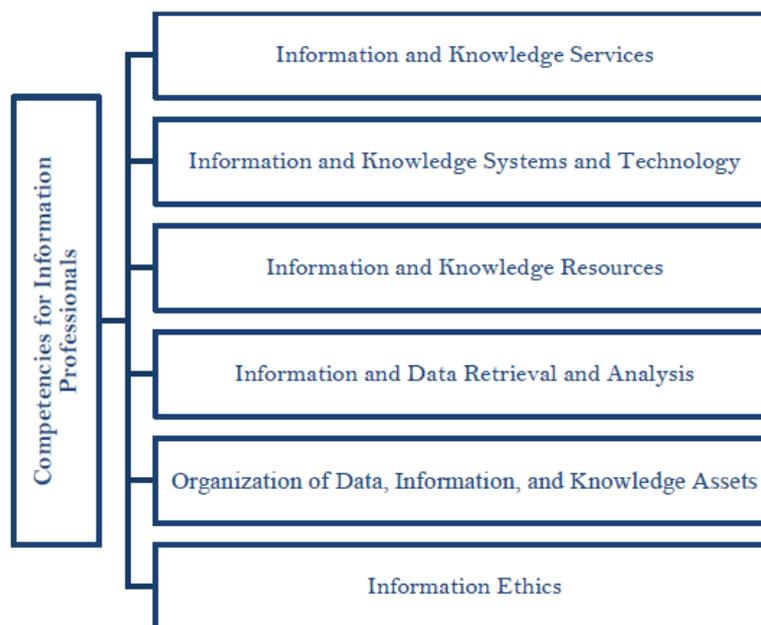
Perpustakaan BSN merupakan salah satu perpustakaan khusus lembaga pemerintah yang menjadi bagian dari unit kerja di Badan Standardisasi Nasional (BSN). Perpustakaan BSN berada di unit eselon dua yaitu Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi (HKLI). Bahrudin (2019) menunjukkan bahwa Perpustakaan BSN memiliki tugas dan fungsi diantaranya sebagai berikut;

- a) Layanan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK);
- b) Pendayagunaan, kemas ulang, dan promosi informasi SPK;
- c) Pengelolaan dan pengembangan jejaring informasi SPK;
- d) Layanan pengaduan masyarakat;
- e) Pengembangan koleksi referensi SPK dan sistem aksesnya;
- f) Pengelolaan repositori BSN;
- g) Layanan referensi dan dokumen standar;
- h) Pengkajian perpustakaan dan kepustakawanan;
- i) Literasi informasi SPK; dan
- j) Pengelolaan jejaring perpustakaan.

Lebih lanjut, menurut Bahrudin (2019), pada pelaksanaannya tugas dan fungsi tersebut tidak membatasi Perpustakaan BSN untuk memberikan layanan inovatif dalam rangka mendukung kinerja strategis BSN. Termasuk dalam hal ini Perpustakaan BSN, melalui pustakawannya, mengakomodasi tugas sebagai *liaison officer* (petugas penghubung) BSN di PTSP Pusat Kementerian Investasi/BKPM. Sebelum berlanjut pada bahasan mengenai keterampilan dan kompetensi inti yang dibutuhkan oleh pustakawan untuk mendukung ekosistem investasi di Indonesia, penulis akan memetakan *core competencies* (kompetensi inti) pustakawan yang dirumuskan oleh beberapa asosiasi profesi yang terkait, diantaranya *Special Library Association* (SLA) dan *Association of College and Research Libraries* (ACRL). Kompetensi yang dirilis 2 (dua) asosiasi ini erat kaitannya dengan bahasan ini karena terkait dengan kompetensi bagi pustakawan khusus, yaitu pustakawan yang bekerja di lingkungan perpustakaan khusus.

**a. *Special Library Association (SLA)***

Pada 13 April 2016, Dewan Direksi SLA menyetujui dokumen yang berisi set kompetensi inti bagi *information professional* (profesional informasi). Kompetensi ini berlaku untuk berbagai jenis audiens, termasuk pustakawan, anggota SLA, siswa, dan pendidik di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan berbagai label profesional informasi terkait lainnya. SLA (2016) menyatakan bahwa terlepas dari jabatan dan label profesional mereka, para profesional informasi terhubung dengan fokus mereka pada pengelolaan dan penerapan data, informasi, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam aktivitasnya. Mereka mengambil pandangan holistik tentang peran informasi dan pengetahuan dalam organisasi dan masyarakat, dan mereka peduli dengan informasi dan pengetahuan melalui semua tahap siklus hidup mereka. SLA menyediakan 6 (enam) kompetensi bagi para profesional informasi (lihat Gambar 2) untuk memungkinkan mereka berpikir kritis, komunikasi efektif, kreativitas, inovasi, kualitas kepemimpinan, etika profesi, dan belajar sepanjang hayat.



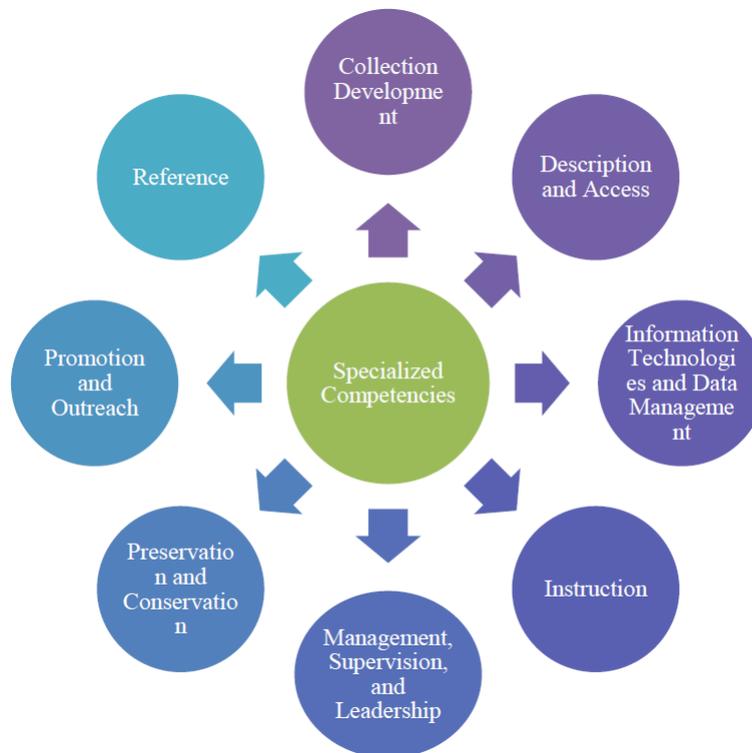
**Gambar 2. Kompetensi untuk profesional informasi menurut SLA**

Sumber: R., Aavarti, Asjola, Chaudhary, & Muduli (2018)

**b. *Association of College and Research Libraries (ACRL)***

Pada Juli 2008, ACRL merumuskan suatu pedoman kompetensi untuk profesional yang menangani koleksi khusus (pustakawan koleksi khusus, -pen). Dokumen ini kemudian direvisi pada Maret 2017 dan berisi identifikasi kompetensi inti, praktik

profesional, identitas umum untuk pustakawan koleksi khusus yang setara dengan pustakawan akademik dan penelitian. Pustakawan koleksi khusus membutuhkan 2 (dua) jenis keterampilan dan pengetahuan yang mendasar dan khusus (lihat Gambar 3).



**Gambar 3. Kompetensi untuk profesional koleksi khusus menurut ACRL**

Sumber: R., Aavarti, Asjola, Chaudhary, & Muduli (2018)

### c. Kompetensi Pustakawan sebagai Profesional Informasi

Pendit (2008) menunjukkan bahwa jika sebuah masyarakat mengalami 'kerepotan' dalam menangani persoalan informasi di dalam kehidupan mereka, maka masyarakat itu memerlukan bantuan orang-orang profesional, yaitu orang-orang yang biasa disebut *information professional* (pekerja informasi). Para pekerja atau profesional informasi inilah, termasuk dalam hal ini pustakawan, yang diharapkan memiliki kompetensi tertentu yang berguna bagi masyarakat. Kompetensi ini akan menempatkan pustakawan sebagai subjek, bukan objek dalam struktur masyarakat informasi. *Special Library Association* (SLA) mendefinisikan kompetensi sebagai interaksi pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara efektif dari sudut pandang pelaku dan pengamat. Kompetensi yang unik dari pustakawan khusus mencakup pengetahuan mendalam tentang sumber daya informasi cetak dan elektronik di bidang *specialized subject* (studi khusus) dan desain dan pengelolaan layanan informasi yang memenuhi kebutuhan informasi strategis individu atau kelompok yang dilayani.

Pustakawan adalah bagian dari sebuah institusi, baik itu perpustakaan maupun lembaga informasi lainnya, sehingga kompetensi pustakawan dalam hal ini dapat dilihat

sebagai bagian dari kerja. Oleh karena itu, kompetensi pustakawan merupakan bagian dari profesionalisme pekerja, dalam hal ini profesional informasi. Fenomena yang terjadi di perpustakaan khusus, pustakawan diharuskan memiliki kompetensi-kompetensi yang seringkali sama sekali berbeda antara lembaga satu dengan yang lainnya. Hal itu tidak terlepas dari aktivitas bisnis, tujuan, dan fungsi lembaga induk di mana perpustakaan khusus tersebut bernaung, termasuk dalam hal kekhasan dari koleksi yang dikelola oleh perpustakaan khusus tersebut. Dampaknya ialah bahwa standar-standar kompetensi yang telah ada saat ini, belum mampu memenuhi kriteria kompetensi inti yang menyesuaikan dengan kebutuhan setiap lembaga perpustakaan khusus, sehingga diperlukan adanya demokratisasi dan keterbukaan untuk mengidentifikasi dan menerapkan kompetensi yang tepat untuk meningkatkan kinerja pustakawan dan organisasi.

Pendit (2008) meletakkan persoalan kompetensi pustakawan di Indonesia secara lebih kontekstual dan mengaitkannya dengan 3 (tiga) hal penting, sebagai berikut;

- a) Perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang secara langsung memengaruhi kebutuhan masyarakat yang kompeten di bidang informasi, sehingga “kompetensi informasi” dapat menjadi kebutuhan semua pihak, bukan hanya pustakawan;
- b) Posisi pustakawan dalam sistem kerja yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan menentukan bagaimana kompetensi ditetapkan dan dijadikan alat ukur; dan
- c) Ketersediaan sarana pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi merupakan “harga mati” jika kompetensi ingin dikaitkan dengan kinerja keseluruhan sebuah organisasi.

Berdasarkan poin (b) di atas, memperkuat argumen bahwa pustakawan harus memiliki kompetensi yang spesifik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat (*stakeholder*), termasuk dalam hal ini pustakawan BSN yang ditugaskan sebagai *liaison officer* (petugas penghubung) di PTSP Pusat Kementerian Investasi/BKPM membutuhkan peningkatan, penguatan, dan pengembangan berbagai aspek keterampilan dan kompetensi yang relevan. Identifikasi kompetensi inti pustakawan yang relevan sangat urgen untuk mencapai kinerja pustakawan dan organisasi (BSN) yang optimal.

#### **d. Kompetensi Inti Pustakawan untuk Mendukung Ekosistem Investasi**

Proses identifikasi dan rumusan kompetensi pustakawan untuk mendukung ekosistem investasi di Indonesia ini dilakukan berdasarkan studi kasus di Perpustakaan BSN. Perpustakaan BSN dalam hal ini memiliki pustakawan yang saat ini ditugaskan sebagai *liaison officer* atau staf penghubung di PTSP Pusat Kementerian Investasi/BKPM sebagai upaya partisipasi BSN dalam menciptakan sistem terintegrasi dalam memberikan dukungan layanan bagi investor maupun calon investor terkait perizinan dan nonperizinan

aktivitas investasi. Pustakawan tersebut dalam kajian ini berlaku sebagai informan tunggal yang menjadi narasumber bagi penulis dalam mengidentifikasi *core competencies* (kompetensi inti) yang dibutuhkan. Kajian ini dilakukan sebagai upaya untuk memahami dengan baik pentingnya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pustakawan yang berkelanjutan. Selain itu, Everhart (2017) menunjukkan bahwa bagi individu dan organisasi, identifikasi kompetensi inti ini juga dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan pustakawan profesional agar secara jelas mengomunikasikan kesiapannya untuk menempati posisi tertentu atau perkembangan karir.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan diskusi dengan informan, peneliti merumuskan 11 (sebelas) poin *core competencies* (kompetensi inti) pustakawan (Gambar 4), khususnya dalam studi kasus ini adalah pustakawan BSN, untuk mendukung ekosistem investasi di Indonesia.



Gambar 4. Kompetensi inti pustakawan untuk mendukung ekosistem investasi

Sumber: Bahrudin & Fadillah (2021)

### 1) *Subject specialist* di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)

Smith (1974) dalam Cassner & Adams (2008) memberikan rincian terkait *subject specialist librarian* sebagai pustakawan yang memiliki pengetahuan khusus dan orientasi pada pengguna yang kuat. Sementara Cassner dan Adams (2008) menunjukkan identifikasi *subject specialist* sebagai pustakawan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus yang mampu memberikan instruksi bibliografi, layanan referensi, pengembangan koleksi, dan

Mendefinisikan ulang keterampilan dan kompetensi pustakawan untuk mendukung ekosistem investasi di Indonesia:

studi kasus di perpustakaan BSN

(Muhammad Bahrudin dan Nursidik Fadillah)

penghubung antara fakultas dan mahasiswa dalam satu atau lebih bidang disiplin ilmu.

Berdasarkan definisi di atas, maka kompetensi *subject specialist* di bidang SPK dapat didefinisikan sebagai pustakawan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus di bidang SPK dan mampu memberikan layanan referensi maupun instruksi bibliografi, serta menjadi penghubung antar-*stakeholder* (pemangku kepentingan) mulai dari pemerintah, produsen, konsumen, akademisi, maupun masyarakat secara umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ruang lingkup kompetensi ini dapat mencakup tapi tidak terbatas pada;

- aspek standardisasi secara umum;
- aspek penilaian kesesuaian, seperti jenis lembaga penilaian kesesuaian, skema akreditasi, jenis akreditasi, skema sertifikasi produk, termasuk produk-produk wajib ber-SNI, produk tidak wajib ber-SNI, penerapan SNI, dan tipe-tipe sertifikasi; dan
- *stakeholder* (pemangku kepentingan) terkait di bidang SPK, baik internal BSN maupun eksternal (lembaga-lembaga terkait lainnya).

Pemahaman khusus ini sangat penting karena mencakup tugas dan fungsi utama BSN dalam mengelola kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dalam kaitannya dengan pengelolaan layanan investasi di PTSP Pusat. Pustakawan BSN secara umum memiliki kewajiban untuk memahami tugas dan fungsi utama lembaga induknya ini sebagai bagian dari kinerjanya sehari-sehari. Gap yang mungkin masih terjadi adalah bahwa tidak semua pustakawan di BSN memiliki kesempatan untuk mempelajari semua aspek teknis terkait SPK dan solusi paling tepat dalam hal ini adalah sinergi dengan unit terkait, selain dengan tetap mengupayakan pengembangan kompetensi SPK baik secara individu maupun institusional. Sebagai catatan pada poin ini adalah bahwa *subject specialist* dapat bervariasi sesuai di mana pustakawan bertugas atau di mana lembaga induk tempat pustakawan tersebut bernaung karena setiap lembaga memiliki tugas, fungsi, dan sumber daya yang berbeda.

## 2) ***Industrial and investment skills*** (pengetahuan dan pemahaman ekosistem industri dan investasi) di Indonesia

Sebagai *subject specialist* SPK yang ditugaskan untuk mengelola layanan terkait investasi, pengetahuan dan pemahaman tentang ekosistem industri dan investasi mutlak diperlukan. Sebelum bertugas sebagai *liaison officer* (petugas penghubung) di PTSP Pusat, pustakawan ini perlu dibekali dengan

pengetahuan mengenai panduan dan prosedur berinvestasi di Indonesia, serta perizinan-perizinan terkait investasi seperti izin usaha, izin lingkungan, izin usaha, dan izin operasional/komersial. Selain itu saat pustakawan juga perlu memahami layanan-layanan yang tersedia untuk mendukung kinerja investasi di Indonesia, terutama Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), termasuk juga jenis investasi yang termasuk dalam Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

### 3) *Aspek legal and policy skills* (kemampuan tentang aspek legal dan kebijakan) investasi di Indonesia

Segala aspek dalam kaitannya dengan aktivitas perekonomian tidak terlepas dari dimensi legal dan kebijakan, termasuk dalam hal ini investasi. Oleh karena itu, pengetahuan pustakawan terkait aspek legal dan kebijakan investasi di Indonesia juga dibutuhkan untuk mendukung kinerjanya. Setidaknya pustakawan BSN dalam hal ini perlu mempelajari dan memahami *omnibus law* (UU Cipta Kerja) yang menjadi payung hukum kegiatan investasi di Indonesia, utamanya yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tak langsung dengan fungsi dan peran BSN. Berdasarkan laman [www.investindonesia.go.id](http://www.investindonesia.go.id) (Kementerian Investasi/BKPM, n.d.) menunjukkan bahwa aspek legal dan kebijakan investasi di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu;

- a) Peraturan investasi, mencakup *tax holiday* (cuti pajak), OSS, perizinan dan fasilitasi penanaman modal, penanaman modal, daftar negatif investasi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, *tax allowance* (tunjangan pajak), dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- b) Peraturan sektoral, mencakup sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pertahanan dan keamanan, perindustrian, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perdagangan, komunikasi dan informatika, ketenagakerjaan, perhubungan, kesehatan, pendidikan, dan keuangan.

### 4) *Data literacy skills* (keterampilan literasi data)

Pada makalah ini, *data literacy* (literasi data) didefinisikan sebagai:

*“...the ability to ask and answer real-world questions from large and small data sets through an inquiry process, with consideration of ethical use of data. It is based on core practical and creative skills, with*

Mendefinisikan ulang keterampilan dan kompetensi pustakawan untuk mendukung ekosistem investasi di Indonesia:  
studi kasus di perpustakaan BSN  
(Muhammad Bahrudin dan Nursidik Fadillah)

*the ability to extend knowledge of specialist data handling skills according to goals. These include the abilities to select, clean, analyse, visualise, critique and interpret data, as well as to communicate stories from data and to use data as part of [decision making]*" (Wolff, Daniel, Montaner, Rashid, & Kortuem, 2016).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *skill set* literasi data yang perlu dimiliki seorang pustakawan dalam hal ini diantaranya sebagai berikut;

- *selecting* (memilih data);
- *cleaning* (membersihkan data);
- *analyze* (menganalisis data);
- *visualize* (visualisasi data);
- *critique and interpret* (mengkritik dan menginterpretasikan data);
- *data storytelling/communicating* (mengomunikasikan cerita dari data);
- *data as part of decision making* (menggunakan data sebagai bagian dari pengambilan keputusan); dan
- *ethical use* (penggunaan data secara etis).

Ketika pustakawan mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugasnya secara umum maupun secara khusus dalam hal ini yang berkaitan dengan ekosistem investasi, tentu akan banyak berhubungan dengan data. Data yang berkorelasi dengan pelaksanaan tugas kepastakawaaan tersebut penting untuk dikelola dan diberdayakan baik untuk kepentingan pengguna maupun kinerja organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek etis terutama jika data yang dikelola merupakan data sensitif, misal yang terkait data pribadi pengguna, transaksi perbankan, kesehatan, dan sebagainya.

##### **5) *Identifying user segmentation and needs skills* (keterampilan untuk mengidentifikasi segmentasi dan kebutuhan pengguna)**

Aspek kompetensi ini erat kaitannya dengan konsep *library marketing* (pemasaran perpustakaan) ataupun *marketing* (pemasaran) secara umum. Segmentasi ini merupakan langkah paling penting dalam kegiatan perencanaan pemasaran. McDonald dan Dunba (2004) dalam Yi (2016) menunjukkan bahwa segmentasi *user/customer* (pengguna) adalah proses *splitting user* (pemisahan pengguna) atau pengguna potensial menjadi kelompok-kelompok atau segmen yang berbeda, di mana pengguna tersebut berbagi dalam tingkat minat yang sama atau sebanding yang dipenuhi oleh proposisi pemasaran yang berbeda-beda. Lebih lanjut, De Saez (2002) dalam Yi (2016) mengemukakan pendapat

bahwa segmentasi tersebut dapat dibagi berdasarkan geografi, demografi, geodemografi, *behavior* (perilaku), *lifestyle* (gaya hidup), atau psikografi.

Sebagai *subject specialist* yang bertugas di ekosistem investasi, segmentasi pengguna sangat penting dilakukan diantaranya sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pengguna tersebut dan informasi relevan yang bisa diberikan kepadanya. Secara sederhana, sebagai contoh segmentasi pengguna ini dapat dilakukan berdasarkan;

- jenis investasi, mencakup Penanaman Modal Asing/PMA, dan Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN; dan
- sektor investasi, mencakup sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pertahanan dan keamanan, perindustrian, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perdagangan, komunikasi dan informatika, ketenagakerjaan, perhubungan, kesehatan, pendidikan, dan keuangan.

#### 6) ***Technology acquisition skills* (keterampilan akuisisi teknologi)**

Di era serba digital, pustakawan harus memiliki pengetahuan teknis yang cukup tentang cara menggunakan mesin, seperti komputer, fotokopi, *scanner*, printer, dan lain-lain. Teknologi berkembang pesat setiap hari, termasuk pula hadirnya berbagai *software* (perangkat lunak) dan aplikasi yang sangat memungkinkan dapat mengoptimalkan kinerja pustakawan. Sebagai contoh, di masa pandemi COVID-19 di mana pekerjaan semakin dituntut fleksibel baik secara waktu dan tempat, tersedia begitu banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk kerja kolaborasi secara *online* (daring) seperti Trello, Asana, Wrike, Basecamp, Notion, dan lain-lain. Aplikasi rapat virtual seperti Zoom Meeting, Google Meet, *Cisco Webex*, *Skype*, *Microsoft Teams*, dan lain-lain juga makin umum digunakan oleh masyarakat saat ini.

#### 7) ***Information retrieval skills* (keterampilan temu kembali informasi)**

Pustakawan bekerja dengan dukungan sumber-sumber informasi baik dalam *printed* (format tercetak) maupun *e-resources* (elektronik). Banyaknya sumber informasi tersebut tentunya membutuhkan keterampilan khusus ketika pengguna meminta kepada pustakawan untuk menemukan informasi tertentu pada *database* (basis data) yang dimiliki oleh perpustakaan atau organisasi, bahkan dari sumber informasi eksternal. Keterampilan ini biasa disebut sebagai *information retrieval skills* (temu kembali informasi). Pustakawan, dalam hal ini yang bertugas di ekosistem investasi, perlu mengidentifikasi sumber-sumber

informasi baik internal maupun eksternal yang relevan dengan bidangnya serta dapat berpikir logis dan analitis agar secara efektif dapat mencari dan menemukannya kembali sesuai kebutuhan pengguna.

#### 8) ***Assertive communication skills*** (keterampilan komunikasi asertif)

Menurut laman [www.indeed.com](http://www.indeed.com) (Indeed, 2021), “komunikasi asertif adalah strategi komunikasi dengan penyampaian secara terbuka serta menjaga rasa hormat kepada orang lain”. Cara penyampaian secara asertif merupakan komunikasi yang kuat dan tegas tetapi tetap tenang. Sebagai pustakawan yang banyak berhubungan dengan manusia, baik secara langsung maupun saat pandemi ini yang sebagian besar dilakukan secara daring, keterampilan berkomunikasi secara asertif ini sangat penting untuk dimiliki dan dikelola agar pengguna dapat merasakan layanan terbaik serta tetap menaruh rasa hormat tanpa terkesan segan. Lebih lanjut, *Indeed*, seperti dilansir dalam *Glints* (2021) memberikan beberapa tips untuk meningkatkan komunikasi asertif dengan baik, sebagai berikut;

- Perhatikan gaya komunikasi. Jika gaya bicara selama ini cenderung pasif maka perlu untuk meningkatkan ketegasan dalam berkomunikasi.
- Meminta *feedback* (umpan balik). Jangan takut untuk mempraktikkan metode komunikasi asertif dimulai kepada rekan sejawat dan tanyakan *feedback* (umpan balik) atau umpan balik kepada mereka apakah sudah cukup bagus atau ada yang harus diperbaiki.
- Gunakan bahasa tubuh yang kuat. Salah satu cara terbaik untuk mempraktikkan komunikasi asertif adalah dengan menggunakan gaya bahasa tubuh yang kuat, misal selalu menjaga kontak mata dengan pengguna ketika sedang memberikan layanan konsultasi, atau jangan pernah menyalangkan tangan ketika sedang menyampaikan pendapat karena terkesan sombong.

#### 9) ***Information repackaging skills*** (keterampilan kemas ulang informasi)

Terjadinya *information explosion* (ledakan informasi) menyebabkan begitu banyak informasi yang tersedia dan dalam berbagai bentuk. Khot (2020) menunjukkan bahwa informasi-informasi ini hanyalah sekedar alat yang memiliki arti kecil kecuali jika sebaliknya, para profesional informasi dapat mengelolanya. Lebih lanjut, untuk membuat dan meningkatkan nilai dan kegunaannya sebagai produk dan layanan informasi baru. Dalam konteks BSN,

begitu banyak informasi seputar topik standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) yang tersebar dalam berbagai bentuk kecil dan kurang bermakna. Semua itu akan menjadi informasi yang berharga dan bernilai guna jika pustakawan mampu memberikan nilai tambah dengan cara mengumpulkan sumber-sumber informasi yang relevan, menganalisis, dan *repackaging* (mengemasnya kembali) dalam berbagai produk informasi sesuai kebutuhan pengguna, dalam hal kajian ini tentunya kaitannya dengan ekosistem investasi di Indonesia.

#### 10) *Copyright literacy skills* (keterampilan literasi hak cipta)

Todorova dkk. (2017) menunjukkan bahwa *copyright literacy* (literasi hak cipta) didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi *copyright-protected materials* (materi yang dilindungi hak cipta), *fair use* (menavigasi penggunaan yang adil) dan *fair dealing* (transaksi yang adil), memperoleh izin atau menegosiasikan lisensi bila diperlukan, mengenali pelanggaran hukum hak cipta, dan menggunakan materi yang memiliki *ethical use* (hak cipta secara etis). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa keterampilan ini memang sangat erat kaitannya dengan tugas pustakawan sehari-hari. Material yang digunakan oleh pustakawan sebagai sumber informasi dalam memberikan layanan kepada pengguna sebagian besar merupakan materi yang berhak cipta. Oleh karena itu penting diketahui dan dipahami bahwa ketika menggunakan dan memanfaatkan materi tersebut harus selalu menggunakan prinsip *fair use* (menavigasi penggunaan yang adil), *fair dealing* (transaksi yang adil), dan *ethical use* (hak cipta secara etis). Hal tersebut dapat menghindari atau meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum hak cipta baik yang disengaja maupun tidak disengaja saat memberikan layanan kepada pengguna.

#### 11) *Program evaluation skills* (keterampilan mengevaluasi program)

Definisi evaluasi seringkali dibaurkan dengan konsep sejenis lain seperti *monitoring* (pengawasan) atau *appraisal* (penilaian). Meski dalam praktiknya, konsep tersebut memang saling terkait erat, tetapi akan berbeda jika dikaitkan dengan substansi yang hendak diukur. Secara konseptual, Dale (2004) dalam Prayogo (2021) membedakan konsep-konsep tersebut. Evaluasi merupakan upaya menilai keseluruhan sejumlah hasil dari sebuah kegiatan atau program pembangunan. Konsep *monitoring* (pengawasan) lebih spesifik memfokuskan penilaian pada hal tertentu saja seperti keadaan antarwaktu saat program masih dalam proses implementasi. Pustakawan bekerja dengan berbagai macam program kegiatan dari satu waktu ke waktu lainnya, maupun dalam rentang waktu tertentu. Seperti misalnya terkait program yang dilaksanakan dalam

rangka melaksanakan tugas sebagai *liaison officer* (petugas penghubung) di PTSP Pusat, pustakawan dapat melakukan evaluasi program-program menggunakan metode yang tepat. Hasil evaluasi program tersebut diharapkan dapat membantu upaya meningkatkan kinerja pustakawan dan organisasi baik program yang sedang diimplementasikan maupun di masa mendatang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa poin terkait keterampilan dan kompetensi pustakawan untuk mendukung ekosistem investasi di Indonesia. *Pertama*, perpustakaan khusus memiliki kecenderungan sumber daya yang berbeda-beda antara satu lembaga dan lembaga lainnya yang berdampak pada kebutuhan keterampilan dan kompetensi yang berbeda-beda pula. *Kedua*, perpustakaan khusus seperti Perpustakaan BSN dapat bersinergi dengan lembaga di luar lembaga induknya dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi pengguna yang tersegmentasi, dalam hal ini adalah sinergi dengan PTSP Pusat Kementerian Investasi/BKPM untuk mendorong ekosistem investasi yang terintegrasi di Indonesia. Implikasinya ialah perlunya pemetaan *gap* keterampilan dan kompetensi pustakawan yang ditugaskan sebagai *liaison officer* (staf penghubung) terutama yang terkait dengan penguatan *subject specialist* dan juga pengetahuan tentang ekosistem industri dan investasi di Indonesia yang didukung dengan penguatan *core competencies* (kompetensi inti) kepustakawan yang relevan. Selain itu, upaya sinergi tersebut tentunya memerlukan dukungan penuh lembaga induk atau institusi yang menaunginya sehingga diperlukan perencanaan strategis dan berkelanjutan sehingga sinergi yang dilakukan dapat memiliki dampak positif dan berjalan secara optimal. *Ketiga*, pustakawan di perpustakaan khusus sangat penting untuk menguasai subjek di lingkungan kelebagaannya sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga induknya sebagai wujud demokratisasi dan keterbukaan dalam mengimplementasikan kompetensi dan menghasilkan sistem pengukuran yang benar-benar dapat meningkatkan kinerja pustakawan dan lembaga induknya.

*Keempat*, *gap* atau kesenjangan keterampilan dan kompetensi yang dialami oleh pustakawan di perpustakaan khusus dapat diatasi dengan berbagai langkah strategis diantaranya; (1) Pustakawan berinisiatif mengikuti pelatihan secara individu. Khususnya di masa pandemi COVID-19, berbagai *online course* (pelatihan/kursus daring) sangat mudah ditemukan di berbagai platform dan tanpa biaya atau gratis. Lembaga penyelenggaranya pun sangat beragam mulai dari institusi dalam negeri seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga lembaga-lembaga pendidikan bergengsi di luar negeri seperti University of Oxford, University of Leeds, Massachusetts Institute of Technology (MIT), dan lain-lain. Pustakawan dapat memilih berbagai pelatihan yang relevan dengan kebutuhan, dan minatnya dalam rangka pengembangan dan aktualisasi profesi; (2)

Perpustakaan mengakomodasi pengembangan kompetensi pustakawannya dengan pelatihan yang terstruktur dan terprogram. Manajemen perpustakaan tentunya memiliki fungsi pengembangan kompetensi bagi personelnya, dalam hal ini pustakawan. Oleh karena itu, *gap* kompetensi yang muncul akibat dari tugas dan fungsi perpustakaan sangat perlu diakomodir oleh manajemen perpustakaan dengan menyediakan dan/atau menyelenggarakan pelatihan yang relevan bagi pustakawan. Pelatihan ini pun akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk *refreshment* (penyegaran) dari tahun ke tahun; dan (3) Meningkatkan jejaring perpustakaan dan dukungan asosiasi profesi untuk mendapatkan *update* (pembaruan) terkait perkembangan dunia perpustakaan dan informasi, baik di level nasional maupun internasional. Tak bisa dipungkiri bahwa hari ini perpustakaan maupun pustakawan tidak dapat bekerja sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan penyelenggaraan perpustakaan maupun terkait *update* (pembaruan) informasi perkembangan dunia perpustakaan dan kepustakawanan. Oleh karena itu, perpustakaan secara institusi maupun pustakawan secara individu sangat penting untuk berjejaring dengan komunitas atau organisasi profesi dan *stakeholder* (pemangku kepentingan) terkait.

#### **Kontribusi Pada Keilmuan**

Penelitian ini merupakan kajian dalam bidang kepustakawanan, profesionalisme pustakawan, dan/atau pengembangan kompetensi pustakawan, utamanya di lingkungan perpustakaan khusus. Penelitian ini juga berkaitan dengan bidang atau keilmuan manajemen sumber daya manusia (SDM), hukum, dan administrasi pemerintahan. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya atau bidang sejenis mengenai pengembangan kompetensi pustakawan di perpustakaan khusus. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi penelitian bidang lain yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia, hukum hak cipta, dan *best practice* (praktik terbaik) terkait *merit system* (sistem merit) dalam administrasi pemerintahan.

#### **Pernyataan Minat Kajian**

Peneliti bernama Muhammad Bahrudin memiliki minat kajian dalam bidang manajemen informasi, manajemen data, keamanan informasi, manajemen risiko, dan standardisasi. Peneliti bernama Nursidik Fadillah memiliki minat kajian dalam bidang manajemen perpustakaan, manajemen sumber daya manusia, dan standardisasi.

#### **Kontribusi Peneliti**

Peneliti dengan nama Muhammad Bahrudin menyusun desain, metode kajian, wawancara, analisis, dan pembahasan. Peneliti dengan nama Nursidik Fadillah bertindak mengumpulkan data dan verifikasi laporan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas kajian.

#### **Kontribusi Pihak Lain**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Badan Standardisasi Nasional yang telah menyediakan asupan referensi dan juga kepada Program Beasiswa SAINTEK, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah memberikan kesempatan dan dukungan bagi peneliti untuk dapat melanjutkan studi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'la, M. A., & Supriyadi, A. P. (2020). Omnibus law sebagai reformasi hukum investasi di Indonesia berdasarkan asas hirarki peraturan perundang-undangan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 133-159. doi: <http://dx.doi.org/10.19105/al%20huquq.v1i1.3161>
- Bahrudin, M. (2019). *Membangun perpustakaan khusus yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lembaga induk: best practices di Perpustakaan BSN*. Retrieved September 9, 2021, from Researchgate: [https://www.researchgate.net/publication/349703242\\_Membangun\\_Perpustakaan\\_Khusus\\_yang\\_Adaptif\\_dan\\_Responsif\\_terhadap\\_Dinamika\\_Lembaga\\_Induk\\_Best\\_Practices\\_di\\_Perpustakaan\\_BSN](https://www.researchgate.net/publication/349703242_Membangun_Perpustakaan_Khusus_yang_Adaptif_dan_Responsif_terhadap_Dinamika_Lembaga_Induk_Best_Practices_di_Perpustakaan_BSN)
- Broekman, J. M. (2002). *Legal Education, Institutional Skills and European Union Opinions*. Retrieved September 7, 2021, from SSRN: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=301202](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=301202)
- BSN. (2014). *Pengantar standardisasi* (2nd ed.). Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- BSN. (2015). *Peran BSN dalam PTSP Pusat, disosialisasikan ke pemangku kepentingan*. Retrieved September 9, 2021, from Badan Standardisasi Nasional: [https://www.bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/5945/Kemendag-Catat-133-Produk-Tak-Sesuai-Standar](https://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/5945/Kemendag-Catat-133-Produk-Tak-Sesuai-Standar)
- Cassner, M., & Adams, K. E. (2008). The subject specialist librarian's role in providing distance learning services. *Journal of Library and Administration*, 48(3/4), 391-410. doi:10.1080/01930820802289441
- Everhart, D. (2017). *Communicating Competencies for Information Professionals*. Retrieved September 8, 2021, from Special Library Association: <https://www.sla.org/about-sla/competencies/communicating-competencies-information-professionals/>
- Glints. (2021). *Berani Mengutarakan Pendapat di Dunia Kerja dengan Komunikasi Asertif*. Retrieved September 9, 2021, from Glints: <https://glints.com/id/lowongan/komunikasi-aseritif/#.YTsj4Z0zZPY>
- Hodget, D., & Stolte, O. M. (2012). Case-based research community and social psychology: Introduction to the special issue. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 22, 379-389.
- Indeed. (2021). *Skills in Assertiveness: Definition, Tips and Examples*. Retrieved September 9, 2021, from Indeed: <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/assertiveness-skills>
- Kementerian Investasi/BKPM. (n.d.). *Prosedur*. Retrieved September 9, 2021, from Kementerian Investasi/BKPM: <https://www.investindonesia.go.id/id/panduan-berinvestasi/prosedur/peraturan-perundang-undangan>

- Khot, N. (2020). Library organization skills and competencies for library professionals in the ICT environment. *International Journal of Research in Library Science*, 6(1), 174-181.
- Pendit, P. L. (2008). Kompetensi informasi dan kompetensi pustakawan. *Media Pustakawan*, 15(1-2), 54-63.
- Pothier, W. G., & Condon, P. B. (2020). Towards data literacy competencies: business students, workforces needs, and the role of the librarian. *Journal of Business & Finance Librarianship*, 25(3-4), 123-146.
- Prayogo, D. (2021). Evaluasi program corporate social responsibility dan community development pada industry tambang dan migas. *Makara Human Behavior in Asia*, 15(1), 43-58. doi: <https://doi.org/10.7454/mssh.v15i1.893>
- Prihatsani, U., Suryanto, & Henrdiani, W. (2018). Menggunakan studi kasus sebagai metode ilmiah dalam psikologi. *Buletin Psikologi*, 26(2), 126-136. doi:10.22146/buletinpsikologi.38895
- R., M. T., Aavarti, S., Asjola, V., Chaudhary, P., & Muduli, P. K. (2018). *Core Competencies for 21st Century Library and Information Science Professionals*. Retrieved September 10, 2021, from Researchgate: [https://www.researchgate.net/publication/348871436\\_Core\\_Competencies\\_for\\_21st\\_Century\\_Library\\_and\\_Information\\_Science\\_Professionals](https://www.researchgate.net/publication/348871436_Core_Competencies_for_21st_Century_Library_and_Information_Science_Professionals)
- Rachman, T. (2015). *Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BKPM*. Retrieved September 9, 2020, from Republika.co.id: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/badan-pom/15/11/10/nxk6go219-pelayanan-terpadu-satu-pintu-di-bkpm>
- Special Library Association. (2016). *Competencies for Information Professionals*. Retrieved September 10, 2021, from Special Library Association: <https://www.sla.org/about-sla/competencies/>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Todorova, T. Y., Kurbanoglu, S., Boustany, J., Dogan, G., Saunder, L., Horvat, A., . . . Kortelainen, T. (2017). Information professional and copyright literacy: a multinational study. *Library Management*, 38(6/7), 323-344. doi:10.1108/LM-01-2017-0007
- Wolff, A., Daniel, G., Montaner, J. J., Rashid, U., & Kortuem, G. (2016). Creating an understanding of data literacy for a data-driven society. *The Journal of Community Informatics*, 12(3), 9-26. doi: <http://dx.doi.org/10.15353/joci.v12i3.3275>
- Yi, Z. (2016). Effective techniques for the segmentation of academic library users. *Library Management*, 37(8/9), 454-464. doi:10.1108/LM-07-2016-0052
- Yin, R. K. (2002). *Case study research: design and methods* (2nd ed.). Thousand Oaks CA: Sage.